



**Ketua Pansus Raperda RPPLH 20226-2056 DPRD Kota Jogja Oleg Yohan**

## Kawal Ketersediaan RTH, Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Anggota DPRD Kota Jogja Oleg Yohan terus memperjuangkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Hal tersebut menjadi fokusnya sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2026-2056.

**OLEG** mengatakan, Raperda RPPLH 2026-2056 merupakan salah satu dokumen penting. Sebab merupakan dasar hukum yang mengikat eksekutif agar menyediakan RTH. Sekaligus bentuk kebijakan jangka panjang supaya Jogja tetap bisa memiliki ruang ekologis di tengah pesatnya pembangunan perkotaan.

Menurutnya, RTH merupakan wadah peningkatan kualitas hidup warga. Baik itu secara mental, fisik, maupun sosial. Di sisi lain juga menjadi bentuk antisipasi ancaman perubahan iklim yang terus terjadi di bumi.

Oleg menyebut, alasan Kota Jogja harus terus menyediakan RTH juga kuat. Sabab hingga tahun ini, Kota Jogja belum memenuhi angka ideal ketersediaan RTH sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam aturan tersebut ruang terbuka hijau wajib minimal 30 persen dari luas wilayah. Sementara Kota Jogja



mengajak partisipasi masyarakat melalui program kampung bersih dan pengelolaan limbah agar tidak dibuang langsung ke sungai.

"Raperda ini adalah instrumen krusial yang menjadi landasan hukum kuat untuk menjamin kualitas hidup masyarakat Kota Jogja selama tiga dekade mendatang," katanya. (\*/inu/eno/by)

**Pembangunan di Kota Jogja harus berjalan selaras dengan konservasi alam. Supaya bisa tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang."**

**Oleg Yohan**  
Ketua Pansus Raperda RPPLH 2026-2056 DPRD Kota Jogja



**BELUM IDEAL:** Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jogja baru mencapai 23,351 persen. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH minimal 30 persen dari luas wilayah.

baru memiliki 23,351 persen.

"Pembangunan di Kota Jogja harus berjalan selaras dengan konservasi alam. Supaya bisa tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang," ujar Oleg di Kantor DPRD Kota Jogja kemarin (16/3).

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menegaskan, tugas pansus tidak hanya menyusun perencanaan dan peraturan. Namun juga memastikan kebijakan yang telah disusun benar-benar diimplementasikan oleh eksekutif dengan pengawasan legislatif.

Oleh karena itu, Oleg memastikan pihaknya akan mengawal penerapan Perda RPPLH 2026-2056 agar tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas.

Pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja supaya aturan tersebut benar-benar dijalankan.

Bukan tanpa alasan, anggota Komisi B ini menilai, Kota Jogja harus menjadi wilayah yang nyaman dan asri bagi penduduk asli maupun wisatawan. Serta tangguh dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

Selain fokus terhadap penyediaan RTH, Oleg memastikan dalam Raperda RPPLH 2026-2056 juga menaruh atensi kelestarian ekosistem sungai. Wujudnya dengan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 23 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005